

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

JI. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia Telepon. 3500901; Fax. 3521967

NOTULEN RAPAT TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Hari/ Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015 Waktu : 09.00 - 11.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung A.A. Maramis II

Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat

Agenda : 1. Persetujuan terhadap Administrator Independen untuk Laporan EITI

Indonesia Tahun 2012-2013

2. Pembahasan rencana kerja Administrator Independen dan Prosedur

untuk disepakati.

3. Pembahasan Draft Inception Report Laporan EITI Indonesia Tahun

2012-2013

4. Penunjukan Person in Charge (PIC) dari tiap anggota Tim Pelaksana

5. Persetujuan mengenai pemerintah daerah pelapor dalam Laporan EITI

Indonesia 2012-2013

Peserta Rapat

Pemerintah : 1. Dispenda Prov. Riau, diwakili : SF.Harianto, Nazar

2. SKK Migas, diwakili : Selvi

3. Ditjen Perbendaharaan, Kemeenterian Keuangan, diwakili : Tauhid

4 Kementerian Perekonomian, Deputi I, diwakili : Andi Megantara, Febti Wijayanti

5. Ditjen Pajak, diwakili : Ahmad Zaky Zamani, Rezki Destiana, Chenris

 Ditjen Anggaran, diwakili : Seprina Hasan, Fauziah Astrini, Fahrudi Qamal

7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diwakili : Ayu Ratna Angela, A.Irzan, Nasrullah

8. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, diwakili : Haryat Prasetyo, Tresnasih Jusuf

9. Setjen Kementerian ESDM, diwakili: Doddy. H, Rini Zulaecha

10. Ditjen Migas, Kementerian ESDM, diwakili: Tobia.P

11. Kementerian Perekonomian, Deputi III, diwakili: Dadang Yusuf, Axel.P

Asosiasi Industri dan Perusahaan : 1. APBI – ICMA, diwakili : Supriatna Suhala

2. IMA, diwakili : Syahrir.AB

3. Anggota APBI, diwakili: Dwi Buana Ishak

Masyarakat Sipil : 1. PWYP, diwakili: Dewi. Y, Aryanto

2. NRGI, diwakili: Diah Tantri

3. Article 33 Indonesia, diwakili : Chitra.R, Kanti

4. Reswara, diwakili : M. Zukarnain

Bank Dunia : 1. Nat Adams

2. Noriko Toyoda

IA KAP SSS : 1. Ade Ikhwan

2. Imam Sarwoko

3. Sandjaja

4. Suhartono

5. Teuku Mirastra

6. Agus Sutanto

7. Gemi Ruwanti

8. Mulia Nasution

9. Angga Hergunowo

10.Vega Valentina

Sekretariat EITI : 1. Edi Effendi Tedjakusuma

2. Ronald Tambunan

3. Agus Prasetyono

4. Tri Wicaksono

5. Agus Trianto

6. Doni Erlangga

7. Yuliana

8. Yudha Ariadi

A. Pembukaan

- Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bpk. Montty Girianna, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif.
- 2. Beberapa Hal yang disampaikan oleh Pak Montty adalah:
 - Mengenalkan Team Leader Sekertariat EITI Indonesia yang baru, yaitu Pak Edi Effendi Tedjakusuma
 - Mengenalkan Administrator Independen yang telah direkrut dan ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk Pembuatan Laporan EITI Tahun 2012-2013 oleh Kemenko Perekonomian.
 - Penyampaian hasil rekonsiliasi report tahun 2010-2011, yang mana gap nya tidak begitu besar dan bisa dikatakan cukup bagus.
 - Format laporan untuk tahun 2012-2013 selain rekonsiliasi juga memasukan kontekstual information.
 - Mempersilahkan pak Edi untuk menyampaikan agendanya dan dari Administrator Independen untuk menyampaikan presentasi inception report dan workplannya.
- 3. Beberapa Hal yang disampaikan oleh Pak Edi adalah:
 - Memperkenalkan diri baru 2 bulan ini ditunjuk sebagai Team Leader Sekertariat EITI Indonesiai.
 - Menyampaikan Agenda sbb :
 - Mengenalkan terhadap Administrator Independen untuk pembuatan Laporan EITI Indonesia Tahun 2012-2013, yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang terbuka Kemenko Perekonomian, yaitu KAP Sukrisno, Sarwoko, Sandjaja.
 - Penyampaian mengenai Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani pada hari Senin, 25
 Mei 2015 antara Admistrasi Independen KAP Sukrisno, Sarwoko, Sandjaja dengan Kemenko Perekonomian.
 - Pembahasan rencana kerja Administrator Independen untuk disepakati.
 - Pembahasan Draft Inception Report Laporan EITI Indonesia Tahun 2012-2013
 - Penunjukan Person in Charge (PIC) untuk perwakilan dari tiap anggota Tim Pelaksana
 - Persetujuan mengenai pemerintah daerah pelapor dalam Laporan EITI Indonesia 2012-2013.
 Tahun lalu Kaltim dan Kutai Kertanegara sebagai Pemda pelapor, apakah untuk laporan
 2012-2013 akan ada perubahan? Diusulkan 3 propinsi yaitu Kaltim, Riau dan Jawa Timur.
 - Penyampaian hasil rekonsiliasi terhadap 3 tahun laporan EITI Indonesia, yaitu tahun 2009- 2010-2011, yaitu mengenai jumlah perusahaan yang direkonsiliasi dan hasil rekonsiliasinya (mohon dapat dilihat di lampiran slide bahan presentasi pak Edi).

- Untuk standar EITI pelaporan 2012-2013 mengunakan standar baru yaitu selain menyampaikan hasil rekonsiliasi juga memasukan informasi yang bersifat kontekstual yang nanti harus didalami oleh Administrator Independen, untuk mengidentifikasi isu-isu strategis bagi perbaikan tata kelola di sektor industri ekstraktif.
- 4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Tim Administrator Independen yang diwakili oleh Pak Sarwoko, Pak Ade , Bu Desi dan tanggapan dari para peserta rapat adalah sebagai berikut :
 - Sesuai TOR tujuan penugasan IA adalah menyusun laporan tentang keterbukaan informasi (transparansi) dan akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai implementasi industri ekstraktif di Indonesia tahun 2012-2013. (silahkan dapat dilihat di slide presentasi dalam lampiran).
 - Mengenai rencana kerja, penugasan ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan, dengan jadwal rencana kerja yang telah dibuat oleh Adminstrator independen
 - Pak Imam sarwoko mengenalkan anggota tim dari Administrator Independen, yaitu pak Sanjaja, pak Sukrisno, pak Ade, bu Dessi, pak Ata, pak Mulia, bu Gemi, pak Muhariyanto, pak Angga, dan bu Vega.
 - Sesuai rencana kerja, penyusunan laporan akan diselesaikan selama 22 minggu, dengan batas akhir penyampaian final report yaitu tanggal 24 oktober 2015.
 - Inception report akan diselesaikan dalam waktu 3 minggu, yaitu tanggal 12 Juni 2015,dimana dalam draft inception report akan disampaikan mengenai butir-butir mengenai rekonsiliasi dan informasi kontekstual yang diperlukan, dan akan dikonsultasikan dengan anggota MSG (tim teknis dan tim pelaksana) antara lain SKK migas, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, DJPK, dll.
 - Workshop mengenai detail pengisian *template* akan dilaksanakan setelah inception report disetujui dan direncanakan di Minggu ke 3 bulan Juni 2015, sebelum memasuki bulan puasa.
 - Setelah selesai workshop, penyampaian permintaan pengisian oleh entitas pelapor sudah bisa dijalankan dengan jumlah entitas pelapor sbb :
 - Migas: Operator 67 (th 2012) & 72 (th 2013); Non Operator 81 (th 2012) & 85 (th 2013),
 Instansi Pemerintah 3 (DJP, DJMigas, SKK Migas)
 - Minerba: Perusahaan 76 (th 2012) & 99 (th 2013) dan Instansi Pemerintah 3 (DJP, DJ Minerba, DJ Perbendahraan).
 - Cut off report di minggu ke 16, dengan harapan tidak ada perubahan angka2, sehingga draft report dapat segera direview oleh Tim sekertariat maupun oleh Tim pelaksana selama 4 minggu.
 - Draft inception report dimintakan tanggapan dan masukan dari Tim pelaksana dan segera menyampaikannya ke sekertariat paling lambat tanggal 3 juni 2013.
 - Tanggapan oleh Asosiasi yang disampaikan oleh Pak Syahrir dari IMA (Indonesia Mining Assosiation), yaitu mengenai jumlah entitas sektor pertambangan yang jumlahnya ribuan kenapa hanya 76 (2012) dan 99 (2013) yang dijadikan basis entitas pelapor, sesuai dengan hasil dari scoping study yang telah dibuat oleh EY, apakah dengan angka tersebut sdh bisa mewakili?

- Jawaban dari Pak Ade adalah sbb: sebagai basis dalam menentukan perusahaan sebagai entitas pelapor berdasarkan tingkat materialitasnya mengacu pada hasil scoping study EY. Rekonsiliasi untuk entitas sektor migas dilakukan secara keseluruhan (100%), sedangkan sektor minerba dengan ketentuan jumlah royalti dan pajak perusahaan lebih besar dari 25 milyar. Secara keseluruhan angka ini adalah mencapai 80% dari total penerimaan Negara, sehingga dianggap sudah cukup mewakili.
- Tanggapan dari Kemenkeu, sesuai kesepakatan kembali ke scoping study yang telah di buat EY
- Tanggapan dari pak Montty, untuk ke depan dalam basis pelaporan sesuai masukan dari asosiasi bisa lebih mencakup entitas yang lebih banyak sehingga dapat mewakili lebih dari 80% terhadap penerimaan Negara di sektor minerba.
- Pertanyaan dari pak Montty, apa saja yang tercantum dlm coverage of infrastructure provision dan barter arrangment. Tanggapan dari bu Desy, sebagian sudah tercantum dalam draft inception report, namun terkait hal tersebut nanti akan dikonsultasikan dengan pihak terkait.
- Pertanyaan dari pak Aryanto mewakili CSO PWYP, dari hasil scoping study EY apakah nanti dilakukan studi banding dan analisa terhadap ketentuan yang tercantum dalam standar EITI. Jawaban dari Pak Ade: di dalam inception report nanti ada analisa yang membahas terhadap gap analisa antara scoping study EY dengan ketentuan yang tercantum dalam standar EITI, dan mengharapkan masukan dari tim pelaksana.
- Tanggapan dari SKK Migas yang diwakili oleh Bu Selvi: infrastruktur provison dan barter arrangement karena merupakan aset Negara, maka tidak bisa dimasukan dalam penerimaan perusahaan migas.
- Penyampaian dari Pak Ade, mengenai royalty yang selama ini konfirmasinya ke ESDM, usulannya apakah bisa langsung mendapatkan informasi pembayaran royalty sebagai PNBP (penerimaan Negara bukan pajak) tersebut ke Ditjen Perbendaharaan
- Tanggapan Pak Taukhid, dari Ditjen Perbendaharaan, bahwa terkait dengan penerimaan Negara yang sudah masuk final datanya ada di Ditjen Perbendaharaan, namun secara administrasinya ada di masing-masing instansi terkait sebagai instansi yang melakukan penagihan, seperti untuk penagihan royalti ada di Ditjen Minerba, ESDM. Jadi kesimpulannya untuk konfirmasi rekonsiliasi data penerimaan PNBP yang sdh masuk bisa didapatkan di Ditjen Perbendaharaan.
- Penyampaian presentasi oleh Bu Dessi. Mengenai usulan dan potensi masalah terkait dengan contextual report, yaitu gambaran mengenai tata kelola industry ekstraktif di Indonesia, seperti kerangka hukum & kebijakan fiscal yang mengatur industri ekstraktif, kontribusi industri ekstraktif terhadap ekonomi, data produksi, beneficial ownership, informasi mengenai perpindahan lisensi, social expenditure dll (mohon dilihat dilampiran materi presentasi draft inception report).
- Pertanyaan dari pak Imam, apakah untuk laporan di tahun 2012-2013 ini untuk pembahasan informasi kontekstual memakai data tahun 2012-2013 atau data yang terbaru. Pak Montty menyampaikan untuk laporan 2012-2013 tetap harus sesuai dengan kontekstual pada saat itu, yaitu tahun 2012-2013, namun perlu juga disampaikan untuk tahun terbaru yang terkait informasi kontekstual bisa disampaikan progresnya seperti apa saja, sehingga terlihat ada progress.

- Bu Dessi menyampaikan mengenai kesulitannya terkait mendapatkan informasi data yang diperlukan, dan adanya perbedaan data dari instansi yang terkait, seperti: di BPS tidak ada data sektor informal menyumbang berapa besar ke industri ekstraktif.
- Tanggapan pak Syahrir dari IMA, untuk data-data yang digunakan pada tahun 2012-2013 data yang dirilis dari BPS yang berasal dari bea cukai dan perdagangan dengan membandingan data riil yang ada di kementerian ESDM terdapat perbedaan, dikarenakan ada data perdagangan yang didapat dari trader yang kemungkinan dari tambang2 ilegal, sehingga data yang betul di ESDM adalah data yang untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan data ekspor mengunakan data BPS, dari situ bisa diperkirakan pendapatan dari sektor informal, akan tetapi untuk tahun 2014 data yang disampaikan sudah lebih bagus dikarenakan KPK sudah turun tangan menanggani perbaikan sistem perijinan, illegal mining, dll.
- Tanggapan dari Bu Citra mewakili CSO, memberikan usulan untuk diadakan pertemuan antara CSO dengan Administrator Independen untuk membahas hal yang berkaitan dengan pelaporan dari informasi kontekstual, Pak Montty setuju diadakannya pertemuan dengan CSO, Asosiasi dan IA untuk membahas lebih lanjut terkait informasi kontekstual tsb.
- Tanggapan dari asosiasi mengenai Informasi terhadap patokan data harga penjualan di sektor minerba dan migas adalah untuk harga komoditas batubara dan migas dari pemerintah sudah mengeluarkan indeks patokan harga batubara dan migas sedangkan untuk data harga komoditas mineral mengikuti harga pasar.
- Penyampaian dari bu Dessi mengenai apakah ada perijinan yang terbaru, Tanggapan asosiasi terhadap progres perijinan di sektor minerba untuk saat ini sejak 2009 belum ada ijin yang keluar karena terkait dengan proses lelang dikarenakan sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan teknisnya, untuk migas bisa dikonsultasikan lagi dengan SKK Migas.
- Penyampaian dari pak Imam sesuai masukan, dimana tim telah membandingkan mengenai laporan kontekstual dari Filipina, Norwegia, Mongolia, yang sesuai standar EITI terbaru. Maka untuk pembuatan kontekstual dilaporan EITI Indonesia 2012-2013 nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan tsb.

B. Hasil Rapat

- Secara umum seluruh peserta rapat dapat menyetujui draft inception report ini, namum jika masih terdapat tanggapan, peserta diminta menyampaikan tanggapannya ke sekretariat sebelum dilakukan rapat tim pelaksana tanggal 12 Juni 2015. Diharapkan pada rapat tersebut sudah dapat disepakatai laporan final inception report sebagai dasar rencana kerja pelaporan EITI Indonesia 2012-2013.
- 2. Penunjukan usulan PIC dari masing-masing anggota Tim pelaksana mohon disampaikan ke sekretariat EITI Indonesia.
- 3. Draft Inception report untuk file soft copy versi detailnya akan di distribusikan ke masing-masing anggota tim pelaksana, sehingga nanti dapat disampaikan masukan & tanggapannya ke sekretariat paling lambat tanggal 3 Juni 2015.

- 4. Usulan pemerintah daerah sebagai pelapor yang dimasukkan dalam pelaporan EITI 2012-2013, adalah Pemda Kaltim, Jawa Timur, dan Riau. Usulannya tambahan sebagai Pemda Pelapor adalah Sumatera Selatan.
- 5. Usulan dari CSO untuk dibuat workshop mengenai temuan-temuan dari Laporan tahun sebelumnya, sehingga bisa dihasilkan usulan perbaikan tata kelola industri ekstraktif yang lebih baik.

Mengetahui, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif

ttd

Montty Girianna